

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA POLDA KEPULAUAN RIAU)

Dafriansyah Putra¹, Ravika Permata Hati²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Batam

Email Koresponden: purradafriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (XO) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) pada Satuan Kerja Polda Kepri. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis berganda (multiple regression) dengan SPSS 17. Dan sampel yang digunakan sebanyak 32 responden yang merupakan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau yaitu pada bagian keuangan Polda Kepulauan Riau (BidKeu). Hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: Hasil analisis variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 4.193 dengan probabilitas 0,000. Dengan t hitung 4.193 lebih besar dari t-tabel $t_{(32)} 1.69726$ atau probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05; maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja polda Kepri. Hasil pengolahan variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai t hitung sebesar 4.237 dengan probabilitas 0,000. Dengan t hitung 4.237 lebih besar dari t-tabel 1.69726 atau probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05; maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja polda Kepri. Diperoleh hasil analisis untuk nilai F adalah sebesar 57.662 dengan probabilitas sebesar Nilai F table adalah sebesar 3.32. Oleh karena itu dengan nilai F hitung lebih besar dari F table yaitu $57.662 > 3.32$ atau probabilitas F hitung lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X1) dan kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) pada Satuan Kerja Polda Kepri.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Based on the results of data analysis and discussion of the influence of the implementation of the local government financial accounting system (X1) and human resource competence (X2) on the quality of local government financial report information (Y) at the Polda Kepri. Analysis was performed using multiple regression with SPSS 17. And the sample used is 32 respondents who are employees who carry out financial administration tasks and functions in the Polda Kepri, namely in the Polda Kepri finance department (BidKeu). The results of the tests and discussions that have been carried out previously, it can be concluded: The results of the analysis of the utilization variable of the regional financial accounting information system (X1) obtained a t-value of 4.193 with a probability of 0.000. With t count 4.193 greater than t table 0.05 (32) 1.69726 or a probability of 0.000 less than 0.05; then H_0 is rejected, which means that the variable utilization of regional financial accounting information systems partially or individually has a significant effect on the quality of financial report information in the Polda Kepri. The results of processing the human resource competence variable (X2) obtained a t-value of 4.237 with a probability of 0.000. With t count 4.237 greater than t table 0.05 (32) 1.69726 or probability 0.000 less than 0.05; then H_0 is rejected, which means that the competency variable of human resources partially or individually has a significant effect on the quality of financial report information in the Polda Kepri. The analysis results obtained an F value of 57.662 with a probability of 0.000. The F table value of 0.05 (2) (32) is equal to 3.32. Therefore, with a calculated F value greater than F table 0.05 (2) (32), namely $57.662 > 3.32$ or a calculated F probability of 0.000 is smaller than 0.05 then H_0 is

rejected and H1 is accepted. This proves that there is a significant influence between the application of the local government financial accounting system (X1) and human resource competence (X2) on the quality of local government financial report information (Y) in the Polda Kepri Work Unit.

Keywords: *Accounting System, Financial Reports, Local Government.*

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Laporan keuangan pemerintah kemudiandisampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al. (1999) dalam Xu et al. (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi

dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

1. Dapat diuji kebenarannya (verifiabel)-Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
2. Netral – Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.
3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*) Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

d. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 358 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan 3.397 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.551 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 5,28 triliun.

METODOLOGI (Material dan Metode)

Objek Penelitian

Objek penelitian menunjukkan lokasi atau tempat penelitian. Objek dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau. Sedangkan subjek penelitian menerangkan target populasi dan sampel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian

Populasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) populasi adalah sekelompok orang, kejadian

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Sampel penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau yaitu pada bagian keuangan Polda Kepulauan Riau (BidKeu).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh, yang termasuk dalam teknik nonprobability sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan teknik nonprobability sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut (Sugiyono, 2011: 62).

Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau. Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada satuan kerja Polda Kepulauan Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Menurut Sugiyono (2007) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi secara langsung kepada responden melalui seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden (pegawai) bagian yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan dimasing-masing Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD)

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani, dkk 2010). Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan dengan indikator tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat efisiensi biaya, dan tingkat kualitas hasil yang mengacu penelitian Yuliani, dkk (2010).

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Hervezi, 2005 dalam Indrisari (2008), Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankannya kepadanya. Variabel ini dapat diukur dengan 4 indikator yaitu pengetahuan, keahlian atau keterampilan, dan perilaku.

Variabel Dependen - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Dianai (2013), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan nilai dari hasil laporan keuangan yang mencakup unsur-unsur yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat, sesuai tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan kata lain relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi kemampuan pemakai laporan keuangan, sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau

konsekuensi dari tindakan yang diambil.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

a. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

b. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Variabel ini diukur 5 pernyataan dengan indikator tingkat relevan, tingkat keandalan, tingkat keterbandingan, dan tingkat keterpahaman yang diadaptasi dari penelitian Yuliani, dkk (2010).

Uji Validitas dan Uji Reliabelitas

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan (Sugiyono dalam Nazaruddin dan Basuki, 2015). Instrumen dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan keadaan data sesungguhnya (Sugiyono, 2007). Dalam uji ini setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Item yang berada dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Suatu data dikatakan valid apabila skor total masing-masing variabel $\geq 0,25$ (Nazaruddin, 2015).

Uji Reliabelitas

Uji reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik (Riduwan dan Sunarto, 2009: 348). Jika nilai $\alpha > 0,6$ artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika $\alpha > 0,80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis atas model regresi utama, diperlukan suatu uji untuk memenuhi asumsi yang mendasari analisis regresi. Uji ini disebut juga uji asumsi klasik yang dikenal dengan istilah *Best Linear Unbiased Estimator (Blue)*. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dalam analisis regresi yang meliputi : tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Digunakan beberapa variabel bebas mengakibatkan adanya peluang variabel bebas saling berkorelasi kuat, yang disebut dengan istilah multikolinieritas sehingga dapat mengganggu ketepatan model regresi yang diuji. Dampak negatif ditemukannya multikolinieritas dalam suatu penelitian menurut Nachrowi (2006) antara lain : 1) varian koefisien regresi yang besar, yang dapat mengakibatkan. 2) melebarnya interval kepercayaan dan kemudian mempengaruhi uji-t sehingga banyak variabel bebas yang tidak signifikan. Meskipun demikian, 3) koefisien determinasi (R^2) akan tetap tinggi, dan uji F tetap signifikan. Selain itu, terkadang angka estimasi koefisien regresi yang diperoleh akan memiliki nilai yang tidak sesuai dengan substansi atau kondisi yang dapat diduga atau dirasakan akal sehat, sehingga mengakibatkan timbulnya interpretasi yang menyesatkan. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model dapat digunakan dengan dua cara, yaitu:

Correlation matrix, multikolinieritas ditemukan apabila hubungan antara variabel bebas

melebihi 0.80 (Gujarati, 1995 dalam Habib dan Bhuiyan, 2011). Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*, nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* yang mendekati 0 atau nilai VIF >5. Untuk menanggulangi terjadinya multikolinieritas dalam model adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel bebas yang memiliki korelasi yang tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel lain yang tidak memiliki korelasi untuk membantu penelitian. Selain itu, dapat dilakukan prosedur *centering*, yaitu prosedur mengubah bentuk persamaan sedemikian rupa yang mengakibatkan hilangnya *intercept* (α_0) sehingga model regresi menjadi lebih sederhana. Dalam konteks ini, prosedur *centering* dapat dilakukan dengan mengurangi variabel yang menyebabkan multikolinieritas dengan nilai rata-ratanya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini proporsi jumlah kuesioner yang telah disebar beserta pengembaliannya.

Tabel 1

Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	35
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	2
Jumlah kuesioner yang kembali	33
Jumlah kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	1
Total kuesioner yang diolah	32
<i>Response Rate</i> (tingkat pengembalian)	91,43%

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian meliputi karakteristik responden dan analisis statistik deskriptif ketiga variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini pembahasan mengenai masing-masing analisis deskriptif.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, jabatan, dan lama bekerja di Satuan POLDA KEPRI.

Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil analisis data berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi (%)
1	Laki-laki	19	60
2.	Perempuan	13	40

	Total	32	100
--	-------	----	-----

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 19 (60%) responden laki-laki dan sisanya sebanyak 13 (40%) adalah responden perempuan. Dengan demikian responden penelitian dengan sebanyak 19 responden (60%) didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

Usia Responden

Dalam penelitian ini, responden dikelompokkan menjadi tiga kelompok usia. Hasil analisis data berdasarkan usia responden dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

No.	Usia	jumlah	Presentase(%)
1.	26-35thn	9	28
2.	36 -45tahun	11	34
3.	> 45 tahun	12	38
	Total	32	100

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden berdasarkan usia dalam penelitian ini responden berusia 26 – 35 tahun sebanyak 9 orang (28%), usia 36 – 45 tahun sebanyak 11 orang (34%), dan usia >45 tahun sebanyak 12 orang (38%). Dengan demikian responden dengan kriteria usia didominasi oleh usia >45 tahun sebanyak 12 orang (38%).

Pendidikan Responden

Tabel 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1.	SMA	6	18
2.	Diploma	6	19
3.	S1	15	47
4.	S2	5	16
	Total	32	100

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden berdasarkan pendidikan responden. Dalam penelitian ini responden yang memiliki latar belakang SMA sebanyak 6 orang (18%), Diploma sebanyak 6 orang (19%), S1 sebanyak 15 orang (47%), dan S2 sebanyak 5 orang (16%). Dengan demikian responden dengan kriteria pendidikan didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 15 orang responden (47%).

Lama Bekerja Responden

Dalam penelitian ini, jumlah responden berdasarkan lama bekerja pada jasa perhotelan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu 0-5 Tahun, 6-10 Tahun, dan >11 Tahun. Berikut ini hasil analisis data untuk karakteristik lama bekerja responden.

Tabel 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Responden

No.	Lama Bekerja	Jumlah	Presentase (%)
1.	0 – 5 Thn	12	37
2.	6 – 10 thn	13	38
3.	> 11 Thn	8	25
	Total	32	100

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden berdasarkan lama bekerja responden.

Dalam penelitian ini responden yang bekerja 0-5 tahun pada jasa perhotelan adalah sebanyak 12 orang (37%), lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 13 orang (38%), dan lebih dari 11 tahun sebanyak 8 orang (25%). Dengan demikian responden dengan kriteria lama bekerja responden didominasi oleh 6-10 tahun sebanyak 13 orang responden (38%).

Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Berikut ini rekapitulasi jawaban responden untuk variabel Kualitas Informasi. Dapat dilihat bahwa dari 32 responden yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel kualitas informasi laporan keuangan diketahui bahwa terdapat responden yang menilai bahwa 3% 'sangat tidak setuju' dengan tingkat kualitas informasi laporan keuangan, sebanyak 5% menilai bahwa 'tidak setuju' kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, sebanyak 27% responden menilai bahwa 'kurang setuju' dengan tingkat kualitas informasi laporan keuangan, sebanyak 45% responden menilai bahwa 'setuju' dengan tingkat kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan, dan sebanyak 19% responden menilai 'sangat setuju' dengan kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh responden pada perusahaan tempat mereka bekerja. Dilihat dari persentase penilaian tertinggi yaitu sebesar 45% responden memberikan penilaian 'setuju' kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh responden di perusahaan tempat mereka bekerja.

Alat Uji Kuesioner

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan $N = 32$. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan program SPSS 17, berikut hasil output untuk masing-masing variabel.

Uji Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X₁)

Berikut ini hasil output statistik untuk validitas item-item pernyataan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 6
 Hasil uji Validitas

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Item 1	0.8870	0.2960	Valid
Item 2	0.8990	0.2960	Valid
Item 3	0.8610	0.2960	Valid
Item 4	0.6520	0.2960	Valid

Sumber: Data diolah sendiri (2019)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item pertanyaan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X₁) dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari hasil r_{tabel} sebesar 0.2960.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X₁) dan kompetensi sumber daya manusia (X₂) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Polda Kepri Satuan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS 17. Dan sampel yang digunakan adalah 32 responden yang merupakan pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi keuangan di Satuan Kerja Polda Kepri yaitu pada bagian keuangan Polda Kepri (BidKeu). Hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,

dapat disimpulkan: Hasil analisis variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1) diperoleh nilai t sebesar 4,193 dengan probabilitas sebesar 0,000. Dengan t hitung 4,193 lebih besar dari t tabel 0,05(32) 1,69726 atau probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka H₀ ditolak yang artinya variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial maupun individual berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Polda Kepri. Hasil pengolahan variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) diperoleh nilai t sebesar 4,237 dengan probabilitas sebesar 0,000. Dengan t hitung 4,237 lebih besar dari t tabel 0,05(32) 1,69726 atau probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka H₀ ditolak yang artinya variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial maupun individual berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Polres Kepri. Hasil analisis nilai F sebesar 57,662 dengan probabilitas 0,000. Nilai F tabel 0,05 (2) (32) adalah 3,32. Oleh karena itu dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel 0,05 (2) (32) yaitu $57,662 > 3,32$ atau probabilitas F hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini membuktikan bahwa air dapat memberikan pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X1) dan kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) pada Satker Polda Kepri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusyadza. (2007). standar akuntansi pemerintahan. <http://abusyadza.wordpress.com> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Afiyah, N.N. (2012). Pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kencana: Jakarta.
- Ahmad Saebni, Beni. (2008). Metode penelitian. Perpustakaan Setia. Bandung.
- Andi Ardi, Kusumah. (2002). Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: Andi.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi sektor publik pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Bungin, B. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Diana, Diane Irma. (2013). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parlamen). E-Journal Vol 2 Universitas Negeri Padang No.1 Padang.
- Fakhrurrazy. (2009). "Standar akuntansi pemerintahan." <http://fathrurazy.wordpress.com> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2012). "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Safitri dan Sofyan. (2008). "Analisis Kritis Laporan Keuangan". PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Harahap, Safitri dan Sofyan. (2011). "Teori Akuntansi". Rajawali Press: Jakarta.
- Harum, Elma. (2014) "Laporan keuangan lembaga bermasalah", <http://suaramerdeka.com> diakses pada 01 September 2016.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). Akuntansi perilaku. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthan, Fred. (2006). Perilaku organisasi. Edisi pertama. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Pedoman bagi eksekutif, DPRD dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik. Penerbit Sekolah Tinggi Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). akuntansi sektor publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Megawati., Ni Luh, G dan Sujana, E. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Kantor Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Vol.3 No.1)
- Metrobali.com. (2013). "BPK Harapkan 60 Persen Kabupaten Capai WTP". Tersedia di: <http://metroballi.com/2013/08/28/bpk-harapkan-60-persen-kabupaten-raih-wtp/> diakses pada 17 Oktober 2013.
- Mulyadi. (2001). Sistem akuntansi (edisi ketujuh). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2002).” Buku audit I, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Morrisan, MA (2012). Metode penelitian survei (edisi pertama). Jakarta: Kencana.
- Nugroho, B.A. (2005). Strategi yang tepat untuk memilih metode statistik penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI
- Nugraheni., Purwaniati dan Subaweh., I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13
- Oktaviani, Vidya. (2012). “Akuntansi Keuangan Daerah”, <http://vidyaoktaviani.blogspot.com> diakses pada tanggal 26 Agustus 2016.